

RENCANA STRATEGIS

TAHUN
2022 - 2026



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR**





KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan Rahmat dan hidayah-Nya jualah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2022 - 2026 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar ini merupakan rencana penyelenggaraan program-program kegiatan sesuai dengan visi misi yang telah dirumuskan dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pengawasan di urusan Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar memiliki tugas menjalankan serangkaian kegiatan, dengan harapan dapat lebih berperan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, maka tersedia bahan rencana aksi terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

Martapura, 12 Januari 2022

KEPALA DINAS



Ir. Mursal, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19631231 199003 1 114



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2022 – 2026 yang telah tersusun, harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sebagai unsur perangkat daerah yang bertugas mendukung tugas kepala daerah dalam bidang pengendalian dampak lingkungan di daerah, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Tahun 2022-2026 yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja, melakukan perubahan kearah perbaikan yang disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan serta mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang strategis.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra SKPD terdiri dari tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan Renstra SKPD, Penyusunan rancangan Renstra SKPD,
- Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD, dan penetapan Renstra SKPD.

Pemerintah Kabupaten Banjar saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2005-



2025 (Perda No. 4 Tahun 2013) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026 (Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penyusunan Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Program Pembangunan Nasional (SPPN), pada pasal 15 ayat 3, disebutkan bahwa "Kepala Satuan Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD". Selanjutnya dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra merupakan komitmen setiap SKPD dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Daerah yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya, serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Pembentukan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ini dilandasi oleh terbitnya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan



Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, serta Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahan, permukiman dan lingkungan hidup yang meliputi dua urusan yakni Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar didasari dengan landasan hukum :

1.2.1. UNDANG - UNDANG

- a. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



- d. Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e. Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- f. Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- i. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1.2.2. PERATURAN PEMERINTAH

- a. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banjar
- d. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksana SKPD

1.2.3. PERATURAN PRESIDEN

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sosial.



1.2.4. PERATURAN MENTERI

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
- b. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pembuatan RENSTRA SKPD.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Persampahan
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022



1.2.5. PERATURAN DAERAH

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Banjar;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2021-2026
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibuatnya Rencana Strategis Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2022 – 2026 yaitu :

- Memberikan arah bagi semua aparatur dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang perumahan, Kawasan permukiman dan lingkungan sehingga tujuan , sasaran program / kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat tercapai.
- Mempermudah pengendalian kegiatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perumahan, Kawasan permukiman dan lingkungan daerah baik internal maupun eksternal.



- Menunjukkan sinkronisasi pembangunan di Kabupaten Banjar , khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Banjar dengan RENSTRA Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup .

Sedangkan tujuan Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar membuat Rencana Strategis adalah :

- a. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan pada Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
- b. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan yang terencana dan akuntabel.

Memberikan pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program /kegiatan Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2022 – 2026.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategik (RENSTRA) Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2022 – 2026 ini terdiri dari 7 Bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN, berisikan tentang Latar Belakang disusunnya Renstra Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, yang berisi Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, yang berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra KL dan Renstra Propinsi, Telaahan RTRW dan KLHS dan Penentuan isu – isu strategis.
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN, yang Tujuan Sasaran Jangka Menengah SKPD.
BAB V	:	STRATEGI DAN KEBIJAKAN, yang berisi Strategi dan Kebijakan SKPD
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN, yang Berisi Pengantar dan Rencana Program dan Kegiatan SKPD.
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas Pokok dan fungsinya, Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai Rencana Strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yaitu mulai tahun 2022 – 2026.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAH RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1.1. DASAR HUKUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 pasal 6, Perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (8) urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

Tugas Pokok

Tugas Pokok dan Fungsi belum disusun dan ditetapkan oleh Bagian Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi belum disusun dan ditetapkan oleh Bagian Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sesuai dengan pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 56 Tahun 2021, sebagai berikut :

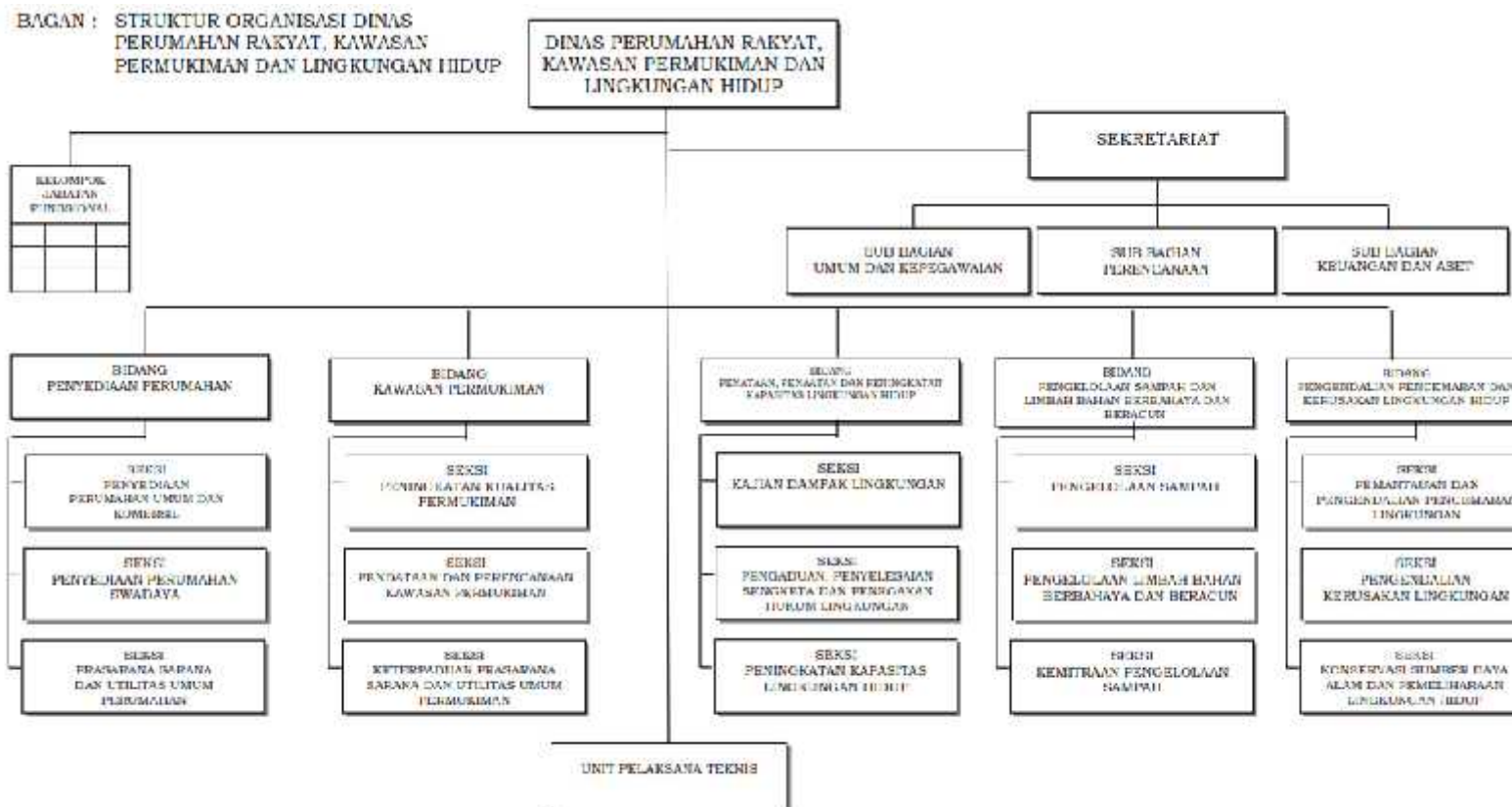
1. Sekretariat, terdiri dari :



- a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Penyediaan Perumahan, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyediaan Perumahan Umum dan Komersil ;
 - b. Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya ;
 - c. Seksi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
 3. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari :
 - a. Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman
 - b. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman
 - c. Seksi Keterpaduan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman
 4. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 - b. Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 5. Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah
 - b. Seksi Pengelolaan Limbah Bahab Berbahaya dan Beracun
 - c. Seksi Kemitraan Pengelolaan Sampah
 6. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - b. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
 - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup



2.1.3. STRUKTUR ORGANISASI (PROSES, PROSEDUR, MEKANISME)





2.1.4. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi belum disusun dan ditetapkan oleh Bagian Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Pemerintahan yang baik (good governance) adalah pra syarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip – prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel, dan pengawasan yang efektif.

Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas, penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini di masa yang akan datang.

Terkait dengan hal tersebut diatas , jumlah aparatur Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar pada tahun 2021 berjumlah 90 (sembilan puluh) orang PNS dan Tenaga Kontrak sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan tugasnya juga di dukung oleh petugas kebersihan, petugas pertamanan, petugas TPA, petugas Taman Kehati, dan petugas PJU.



Komposisi jabatan dan struktur organisasi pada Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1				1
2.	Sekretariat		1	3	11	15
3.	Bidang Penyediaan Perumahan		1	3		4
4.	Bidang Kawasan Permukiman		1	3	2	6
5.	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		1	3	31	35
6.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		1	3	12	15
7.	Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		1	3	3	7
8.	UPT Persampahan			1	5	6
	Jumlah	1	6	19	64	90

Berdasarkan data diatas, jenjang Eselonering menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing. Fungsi koordinasi dan kerjasama merupakan fungsi yang strategis yang dijalankan oleh 5 (lima) bidang dan sekretariat. Lima bidang menjalankan fungsi teknis dalam Penyediaan Perumahan, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Sedangkan sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Selain tersebut diatas, Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup juga memiliki UPT Persampahan yang



dipimpin oleh kepala UPT dan Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan kegiatan.

Kondisi Kepegawaian Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Banjar berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2. Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	S.3	S.2	S.1	D.3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1.	Kepala Dinas		1						1
2.	Sekretariat			8	1	5	1		15
3.	Bidang Penyediaan Perumahan		3	1					4
4.	Bidang Kawasan Permukiman		3	2		1			6
5.	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		1	4		9	15	6	35
6.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1	3	3		6	2	1	16
7.	Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		2	4		1			7
8.	UPT Persampahan			1		3	1	1	6
Jumlah		1	13	23	1	25	19	8	90



Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Tidak Tetap Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S.1	95
2	D. III	9
3	SMA	6
Jumlah		110

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan dengan tingkat pendidikannya, berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas tingkat pendidikan PNS pada Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar yang berpendidikan S.1 sebanyak 23 orang dari jumlah Pegawai 90 orang, S.2 sebanyak 13 orang dan S.3 sebanyak 1 orang serta dibantu oleh tenaga tidak tetap/kontrak sebanyak 110 orang sebagai penunjang pengadministrasian dan penunjang pelaksanaan kegiatan SKPD. Tentunya ini menjadi modal dasar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai dinas yang membantu Bupati.

2.2.2. ASET / MODAL

Aset merupakan kekayaan yang dimiliki setiap SKPD. Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Banjar mempunyai aset sejak berdirinya BAPEDALDA dan Dinas Perumahan Permukiman sebagaimana daftar berikut:

Tabel 2.4. Daftar Aset Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	154.889.749.116,84
1.3.1	TANAH	50.558.619.945,00
1.3.1.01	TANAH	50.558.619.945,00
1.3.1.01.01	TANAH PERSIL	4.036.334.335,00
1.3.1.01.01.01	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	2.784.783.335,00

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



1.3.1.01.01.04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	1.251.551.000,00
1.3.1.01.03	LAPANGAN	46.522.285.610,00
1.3.1.01.03.07	TANAH UNTUK JALAN	46.522.285.610,00
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	7.852.423.141,61
1.3.2.01	ALAT BESAR	467.471.500,00
1.3.2.01.03	ALAT BANTU	467.471.500,00
1.3.2.01.03.04	ELECTRIC GENERATING SET	48.000.000,00
1.3.2.01.03.05	POMPA	20.171.500,00
1.3.2.01.03.08	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	399.300.000,00
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	2.109.851.820,00
1.3.2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	2.017.151.820,00
1.3.2.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	717.638.350,00
1.3.2.02.01.03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	1.012.428.425,00
1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	253.905.000,00
1.3.2.02.01.09	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	33.180.045,00
1.3.2.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	92.700.000,00
1.3.2.02.02.01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	92.700.000,00
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	438.682.510,00
1.3.2.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	62.155.000,00
1.3.2.03.01.01	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	62.155.000,00
1.3.2.03.03	ALAT UKUR	376.527.510,00
1.3.2.03.03.01	ALAT UKUR UNIVERSAL	149.377.510,00
1.3.2.03.03.10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	227.150.000,00
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	15.675.000,00
1.3.2.04.01	ALAT PENGOLAHAN	15.675.000,00
1.3.2.04.01.02	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	15.675.000,00
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	3.082.629.553,93
1.3.2.05.01	ALAT KANTOR	432.456.121,06
1.3.2.05.01.01	MESIN KETIK	43.727.107,36
1.3.2.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	172.299.599,70
1.3.2.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	216.429.414,00
1.3.2.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	2.065.056.649,20
1.3.2.05.02.01	MEUBELAIR	114.718.365,00

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



1.3.2.05.02.03	ALAT PEMBERSIH	201.804.369,48
1.3.2.05.02.04	ALAT PENDINGIN	915.954.282,48
1.3.2.05.02.05	ALAT DAPUR	140.936.210,00
1.3.2.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	661.710.090,24
1.3.2.05.02.07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	29.933.332,00
1.3.2.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	585.116.783,67
1.3.2.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	188.170.456,67
1.3.2.05.03.02	MEJA RAPAT PEJABAT	64.210.740,00
1.3.2.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	211.994.023,00
1.3.2.05.03.04	KURSI RAPAT PEJABAT	89.782.913,00
1.3.2.05.03.07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	30.958.651,00
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	195.807.263,04
1.3.2.06.01	ALAT STUDIO	120.126.513,04
1.3.2.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	75.134.513,04
1.3.2.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	40.177.000,00
1.3.2.06.01.05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	4.815.000,00
1.3.2.06.02	ALAT KOMUNIKASI	69.772.000,00
1.3.2.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	41.332.000,00
1.3.2.06.02.02	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	25.740.000,00
1.3.2.06.02.06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	2.700.000,00
1.3.2.06.03	PERALATAN PEMANCAR	5.908.750,00
1.3.2.06.03.20	SWITCHER/MENARA ANTENA	5.908.750,00
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	34.450.000,00
1.3.2.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	22.000.000,00
1.3.2.08.01.06	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	22.000.000,00
1.3.2.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	12.450.000,00
1.3.2.08.03.05	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	12.450.000,00
1.3.2.10	KOMPUTER	1.507.855.494,64
1.3.2.10.01	KOMPUTER UNIT	1.127.096.427,35
1.3.2.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	1.127.096.427,35
1.3.2.10.02	PERALATAN KOMPUTER	380.759.067,29
1.3.2.10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER	8.446.000,00
1.3.2.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	254.195.117,29

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



1.3.2.10.02.04	PERALATAN JARINGAN	118.117.950,00
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	19.054.497.711,07
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	18.559.489.361,07
1.3.3.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	18.092.064.388,52
1.3.3.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	15.311.699.384,97
1.3.3.01.01.02	BANGUNAN GUDANG	98.730.000,00
1.3.3.01.01.04	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	1.831.834.972,55
1.3.3.01.01.18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	265.714.031,00
1.3.3.01.01.36	TAMAN	584.086.000,00
1.3.3.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	467.424.972,55
1.3.3.01.02.04	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	467.424.972,55
1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	495.008.350,00
1.3.3.04.01	TUGU/TANDA BATAS	495.008.350,00
1.3.3.04.01.01	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	400.000.000,00
1.3.3.04.01.04	PAGAR	95.008.350,00
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	75.485.695.937,29
1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	49.058.877.533,29
1.3.4.01.01	JALAN	49.058.877.533,29
1.3.4.01.01.05	JALAN DESA	8.521.991.510,54
1.3.4.01.01.09	JALAN KHUSUS	40.345.347.022,75
1.3.4.01.01.10	JALAN LAINNYA	191.539.000,00
1.3.4.02	BANGUNAN AIR	2.074.683.750,00
1.3.4.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1.271.462.750,00
1.3.4.02.04.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	1.271.462.750,00
1.3.4.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	803.221.000,00
1.3.4.02.06.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	803.221.000,00
1.3.4.03	INSTALASI	9.145.250.450,00
1.3.4.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	9.145.250.450,00
1.3.4.03.05.09	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	9.145.250.450,00
1.3.4.04	JARINGAN	15.206.884.204,00
1.3.4.04.02	JARINGAN LISTRIK	15.206.884.204,00
1.3.4.04.02.02	JARINGAN DISTRIBUSI	15.206.884.204,00
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	1.938.512.381,87

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	1.645.964.381,87
1.3.5.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1.645.964.381,87
1.3.5.01.01.01	BUKU UMUM	2.275.000,00
1.3.5.01.01.04	BUKU ILMU SOSIAL	1.011.000,00
1.3.5.01.01.06	BUKU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM	23.952.000,00
1.3.5.01.01.07	BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	45.937.730,00
1.3.5.01.01.08	BUKU ARSITEKTUR, KESENIAN, OLAH RAGA	295.479.000,00
1.3.5.01.01.11	BUKU LAPORAN	1.277.309.651,87
1.3.5.05	TANAMAN	292.548.000,00
1.3.5.05.01	TANAMAN	292.548.000,00
1.3.5.05.01.01	TANAMAN	292.548.000,00
1.5	ASET LAINNYA	1.288.852.936,00
1.5.4	ASET LAIN-LAIN	1.288.852.936,00
1.5.4.01	ASET LAIN-LAIN	1.288.852.936,00
1.5.4.01.01	ASET LAIN-LAIN	1.288.852.936,00
1.5.4.01.01.01	ASET RUSAK BERAT/USANG	1.288.852.936,00
1.5.4.01.01.01.02	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	1.288.852.936,00

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Belum disusun dan ditetapkan oleh Bagian Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

Tabel 2.5. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan Undang – Undang No 23 Tahun 2014

No	Sub Bidang	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1				
2				
3				
4				
5				
6				

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



7				
8				
9				
10				
11				

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) dan SUB KEGIATAN	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
	TAHUN 1 (2022)	TAHUN 2 (2023)	TAHUN 3 (2024)	TAHUN 4 (2025)	TAHUN 5 (2026)	TAHUN 1 (2022)	TAHUN 2 (2023)	TAHUN 3 (2024)	TAHUN 4 (2025)	TAHUN 5 (2026)	TAHUN 1 (2022)	TAHUN 2 (2023)	TAHUN 3 (2024)	TAHUN 4 (2025)	TAHUN 5 (2026)
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	61,93	62,25	62,58	62,88	63,18										
PERENSTASE RUMAH LAYAK HUNI	97,16%	97,23%	97,30%	97,38%	97,45%										
PERSENTASE PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%	0,00%										
Indeks Kualitas Air (IKA)	50,20	50,30	50,40	50,50	50,60										
Indeks Kualitas Udara (IKU)	76,83	76,93	77,03	77,13	77,23										
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	54,51	55,64	56,78	57,78	58,78										
Tingkat Pencemaran Air	5,4	5,3	5,2	5,1	5,1										
Indeks Kualitas Air	50,2	50,3	50,4	50,5	50,6										
Indeks Kualitas Udara	76,83	76,83	77,03	77,13	77,23										
Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	25	30	35	40	45										
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1	1	1	1	1										
Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	25	30	35	40	45										
Persentase Desa Yang Ditanggulangi Dampak Kerusakan Lingkungannya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2	2	2	3	3										
Persentase Desa Yang Dilakukan Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1	1	1	1	1										
Persentase Lokasi Kawasan Keekaragaman Hayati Yang Dilindungi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
Persentase Luas Kawasan Keekaragaman Hayati Yang Dilindungi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7										
Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	6,64	11,35	15,79	20,63	24,82										
Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2,5	3	3,5	4	4,5										
Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keekaragaman Hayati	10	20	30	40	50										
Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersedia	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1										
Persentase Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Yang Tersusun	-	-	100,00%	-	-										
Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	0	1	0	0	0										
Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0	1	0	0	0										
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Lingkungan Terhadap Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, Izin RPPLH	100%	100%	100%	100%	100%										
Persentase Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%										
Persentase Sekolah Yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	50,00%	55,00%	65,00%	75,00%	90,00%										
Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	1	1	1										
Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%										
Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%										

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1	1	1	1	1										
Persentase Pelayanan Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang terselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
Persentase Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang Ditindak Lanjuti	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	10	10	10	10	10										
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	5	5	5	5	5										
Persentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
Persentase Hasil Temuan Yang Ditindak Lanjuti	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	15	15	15	15	15										
Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	0	1	1	1	1										
Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30	30	30	30	30										
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	30	30	30	30	30										
PERSENTASE KAWASAN KUMUH	9,67%	9,12%	8,59%	8,05%	7,51%										
Persentase Timbulan Sampah Yang Tertangani	73,00%	72,00%	71,00%	70,00%	70,00%										
Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	26,00%	27,00%	28,00%	29,00%	30,00%										
Persentase Pengurangan Sampah	24,10%	24,20%	24,30%	24,40%	24,50%										
Persentase Sampah Yang Ditangani	61,00%	61,25%	61,50%	61,75%	62,00%										

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1	1	1	1	1										
Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1	1	1	1	1										
Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	65700	65700	65700	65700	65700										
Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4	4	4	4	4										
Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	12	15	15	12	10										
Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	65700	65700	65700	65700	65700										
Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0	0	0	0	1										
Persentase pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3 dari jumlah pengajuan izin yang terregistrasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Izin TPS Limbah B3	50,00%	58,00%	60,00%	62,00%	65,00%										
Jumlah Fasilitasi Persetujuan/izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	1	1	1	1										
Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	1	1	1	1										
Persentase Rumah Layak Huni	97,16%	97,23%	97,30%	97,38%	97,45%										
Persentase PSU Yang Memadai	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
Persentase Penanganan Rumah Yang Terkena Bencana Maupun Terkena Relokasi Program Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%										
Persentase Rumah yang terdata akibat korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%										
Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1										

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	0	1	1	1	1													
Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	0	1	1	1	1													
Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	0	1	1	1	1													
Persentase orang yang memahami materi yang disampaikan setelah mengikuti sosialisasi	100%	100%	100%	100%	100%													
Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	150	150	150	150													
Persentase unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	100%	100%	100%	100%	100%													
Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10	5	5	5	5													
Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	0	5	5	5	5													
Persentase Dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Yang Diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%													
Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	50	50	50	50	50													
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	1	1	1	1													
Persentase pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	22,62%	22,68%	22,78%	22,83%	22,89%													
Persentase RTLH yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	100%	100%	100%	100%	100%													
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	14	14	15	15	16													
Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	20,96%	21,14%	21,33%	21,52%	21,71%													
Persentase Perumahan yang mendapatkan peningkatan kualitas PSU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%													
Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	18	4	4	4	4													

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	1	1	1	1													
Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	0	30	30	30	30													
Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	15	20	25	30	35													
Persentase kawasan kumuh	91,99%	91,92%	90,59%	89,89%	89,20%													
Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	10,13%	15,23%	20,23%	25,23%	30,23%													
Jumlah desa/kelurahan yang teridentifikasi sesuai pola penanganan	3	5	5	5	5													
Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1	2	2	2	2													
Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1	1	1	1	1													
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	5	5	5	5	5													
Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	27,56	2,4	2,4	2,4	2,4													
Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	2	3	3	3	3													
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	5	5	5	5	5													
Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	10	15	15	15	15													
Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	2	2	2	2	2													
Persentase Terselenggaranya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%													
Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%													
Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%													

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	3	2	2												
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	1												
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	1												
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	1												
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	1												
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	3	3	3												
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	16	16	16	16												
Persentase Tersusunya Dokumen Pelaporan dan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%												
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	13	13	13	13												
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13	13	13	13	13												
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	1												
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	16	16	16	16												
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13	13	13	13	13												
Persentase Pegawai yang mengikuti BIMTEK	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%												
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	4	4	4	4												
Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%												
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	6	6	6												
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4	4	4												

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	1	1	1	1													
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	1	1	1	1													
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4	4	4													
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	3	3	3													
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	0	0	0	0													
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0	10	10	10	10													
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	419	419	419	450	450													
Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%													
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1	0	0	0													
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	2	0	1													
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	0	0	0													
Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%													
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	12													
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	3	3	3													
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	3	3	3	3													
Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%													
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	1	1													
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	9	9	9	9													
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	70	70	70	70													
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	1													



Tabel 2.6. Informasi Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Banjar

Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Banjar

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat Pencemaran Air				5,4	5,3	5,2	5,1	5,1										
2	Persentase Lokasi Kawasan Keanekaragaman Hayati Yang Ditangani				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
3	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersedia				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
4	Persentase Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan				25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%										

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



5	Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengelola Lingkungan Hidup				25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%								
6	Persentase Pelayanan Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang terselesaikan				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
7	Persentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
8	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga				26,00%	27,00%	28,00%	29,00%	30,00%								
9	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3 dari jumlah pengajuan izin yang terregistrasi				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
10	Persentase penanganan Rumah Korban Bencana/ Relokasi				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
11	Persentase pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh				22,62%	22,68%	22,78%	22,83%	22,89%								

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



12	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU				20,96%	21,14%	21,33%	21,52%	21,71%								
13	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani				10,13%	15,23%	20,23%	25,23%	30,23%								



Anggaran untuk alokasi Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar bersumber dari Dana PAD/DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Peningkatan Alokasi anggaran masih cukup berbanding lurus dengan serapan anggarannya, meskipun masih ada permasalahan yang disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan yang dananya dilaksanakan pada bulan oktober, khususnya yang berkaitan dengan APBD-P sehingga keterbatasan waktu pada pelaksanaannya.

Kecermatan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Selain itu Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Banjar sebagian besar sudah menerapkan Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai dasar perhitungan dalam penyusunan/perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik yang dapat dipertanggung jawabkan.

Besarnya anggaran yang disediakan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini



Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	31.647.778.830,00	28.441.689.983,32	29.579.357.583,01	30.762.531.885,49	31.993.033.160,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	733.417.000,00	762.753.680,00	793.263.827,00	824.994.380,00	857.994.155,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	#DIV/0!
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	60.867.200,00	65.000.000,00	68.263.827,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	#DIV/0!
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	97.323.600,00	100.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	117.994.155,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	#DIV/0!

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	389.596.700,00	390.000.000,00	390.000.000,00	424.994.380,00	450.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	#DIV/0!
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	185.629.500,00	207.753.680,00	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	#DIV/0!
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.557.004.100,00	1.099.284.264,00	1.143.255.635,00	1.188.985.860,00	1.236.545.294,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,11)	#DIV/0!
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	300.000.000,00	439.713.706,00	457.302.254,00	475.594.344,00	494.618.118,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	#DIV/0!
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.257.004.100,00	659.570.558,00	685.953.381,00	713.391.516,00	741.927.176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,15)	#DIV/0!

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	485.501.200,00	504.921.248,00	525.118.098,00	546.122.822,00	567.967.735,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	#DIV/0!
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	485.501.200,00	504.921.248,00	525.118.098,00	546.122.822,00	567.967.735,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	#DIV/0!
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	14.071.441.400,00	11.722.299.056,00	12.191.191.018,00	12.678.838.659,00	13.185.992.205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,01)	#DIV/0!
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	14.071.441.400,00	11.722.299.056,00	12.191.191.018,00	12.678.838.659,00	13.185.992.205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,01)	#DIV/0!
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	26.041.522.700,00	23.533.443.596,00	23.446.038.334,00	23.343.879.868,00	24.277.635.064,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,02)	#DIV/0!
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	114.542.800,00	419.124.512,00	123.889.492,00	128.845.072,00	133.998.875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,51	#DIV/0!
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	114.542.800,00	119.124.512,00	123.889.492,00	128.845.072,00	133.998.875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	#DIV/0!

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.410.855.100,00	1.467.289.304,00	1.525.980.876,00	1.587.020.111,00	1.650.500.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	#DIV/0!
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.209.765.900,00	1.258.156.536,00	1.308.482.797,30	1.360.822.109,16	1.415.254.994,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	#DIV/0!
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	150.423.200,00	156.440.128,00	162.697.733,10	169.205.642,42	175.973.868,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	#DIV/0!
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50.666.000,00	52.692.640,00	54.800.345,59	56.992.359,42	59.272.053,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	#DIV/0!
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	6.584.707.100,00	4.129.640.424,00	4.294.826.041,00	4.466.619.083,00	4.645.283.846,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,06)	#DIV/0!
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	6.584.707.100,00	4.129.640.424,00	4.294.826.041,00	4.466.619.083,00	4.645.283.846,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,06)	#DIV/0!
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	229.958.400,00	239.156.736,00	248.723.005,00	258.671.926,00	269.018.803,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	#DIV/0!
Penyimpanan Sementara Limbah B3	229.958.400,00	239.156.736,00	248.723.005,00	258.671.926,00	269.018.803,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	#DIV/0!

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	234.666.000,00	244.052.640,00	253.814.746,00	263.967.335,00	274.526.029,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	#DIV/0!
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	234.666.000,00	244.052.640,00	253.814.746,00	263.967.335,00	274.526.029,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	#DIV/0!
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	50.000.000,00	52.000.000,00	54.080.000,00	56.243.200,00	58.492.928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	#DIV/0!
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	50.000.000,00	52.000.000,00	54.080.000,00	56.243.200,00	58.492.928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	#DIV/0!
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	213.435.000,00	221.972.920,00	230.851.837,00	240.085.910,00	249.689.347,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	#DIV/0!
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	213.435.000,00	221.972.920,00	230.851.837,00	240.085.910,00	249.689.347,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	#DIV/0!

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	96.094.000,00	99.937.760,00	103.935.270,00	108.092.681,00	112.416.388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	#DIV/0!
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	96.094.000,00	99.937.760,00	103.935.270,00	108.092.681,00	112.416.388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	#DIV/0!
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	17.107.264.300,00	16.660.269.300,00	16.609.937.067,00	16.234.334.550,00	16.883.707.932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)	#DIV/0!
Pengelolaan Sampah	17.107.264.300,00	16.660.269.300,00	16.609.937.067,00	16.234.334.550,00	16.883.707.932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)	#DIV/0!
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.800.415.130,00	16.352.431.735,32	14.926.529.005,01	15.523.590.164,49	16.144.533.771,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	#DIV/0!
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.053.732,00	51.053.732,32	51.053.732,00	51.053.732,49	51.053.732,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	#DIV/0!
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.235.659.748,00	12.278.994.361,00	12.288.994.361,00	12.841.874.677,00	12.934.714.337,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	#DIV/0!

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	#DIV/0!
Administrasi Umum Perangkat Daerah	629.810.600,00	655.654.835,00	655.574.683,00	872.269.770,00	1.100.093.561,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	#DIV/0!
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.450.127.895,00	1.012.091.426,01	-	700.000.000,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436.424.140,00	450.313.677,00	450.874.445,00	450.958.737,00	451.335.758,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	#DIV/0!
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	457.466.910,00	446.287.235,00	447.940.358,00	1.287.433.248,00	887.336.383,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	#DIV/0!



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DLH

Secara umum, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar memiliki faktor eksternal dan Internal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Tantangan dan peluang pengembangan dan pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar dalam lima tahun kedepan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Semakin tumbuh dan berkembangnya hunian perumahan dan industri
- b. Belum adanya tenaga fungsional pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Banjar
- c. Belum tercukupinya jumlah staf di sekretariat khususnya perencana dan masing – masing bidang
- d. Adanya tenaga terlatih yang dimutasi keluar SKPD
- e. Kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai tugas dan kewajiban
- f. Terbatasnya dana anggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak terakomodir di dalam proses penganggaran
- g. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (Persentase tersedianya luas RTH Publik sebesar 20% dari Luas wilayah kota / kawasan perkotaan
- h. Rendahnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan perumahan
- i. Meningkatnya kebutuhan rumah layak huni dan kualitas perumahan dan permukiman yang baik
- j. Urbanisasi yang dapat berakibat tumbuhnya permukiman kumuh



Sedangkan untuk peluangnya sebagai berikut:

- a. Tersedianya tenaga teknis yang terlatih dan kompetitif
- b. Terbentuknya jabatan UPT untuk bidang laboratorium lingkungan dan persampahan
- c. Tersedianya anggaran dana untuk pelatihan peningkatan SDM
- d. Adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- e. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup yang berkesinambungan
- f. Adanya struktur organisasi dan tata kerja serta uraian tugas yang jelas
- g. Keberadaan pihak swasta/ pengembang yang berperan serta dalam penyediaan/ pemenuhan perumahan bagi masyarakat
- h. Tersedianya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta dukungan anggaran bantuan keuangan provinsi dan DAK untuk penyelenggaraan perumahan dan permukiman di daerah

Meskipun budaya dan peluang yang terjadi pada 5 tahun belakangan masih belum begitu bagus, namun untuk 5 tahun yang akan datang tantangan – tantangan tersebut memberikan optimistis yang positif dengan bergabungnya Bidang Penyedia Perumahan dan Bidang Kawasan Permukiman.

2.4.1. HASIL ANALISIS RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RENSTRA PROVINSI DAN RENSTRA K/L

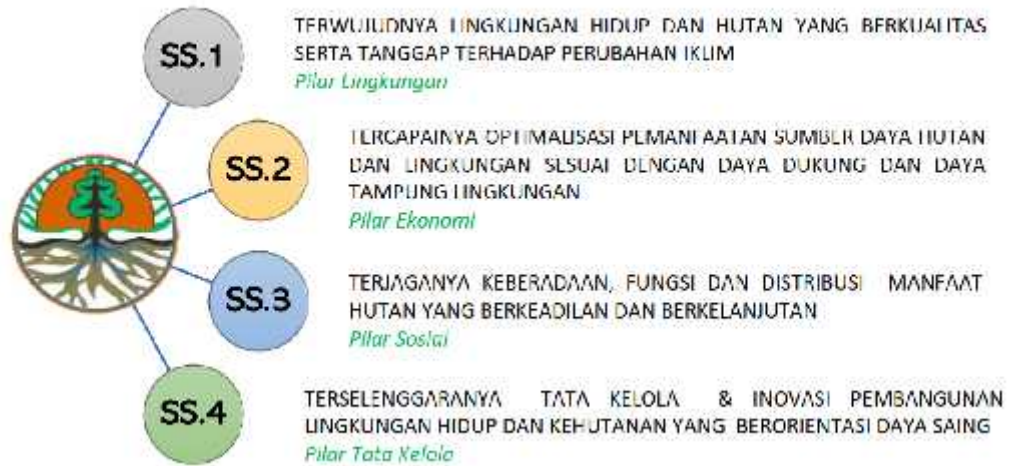
Renstra Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim



2. Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
3. Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing

Sasaran Strategis Kementerian :



Gambar 2.1. Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup

Dari sasaran tersebut, ditetapkan beberapa pencapaian yang ingin diwujudkan. Pencapaian target ini menjadi tanggungjawab pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait khususnya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup .

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020–2024.

Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program,



dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian PUPR.

Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yang diindikasikan dengan:

- a. Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator: (1) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan; (2) Global Competitiveness Index dan Pilar Infrastruktur; (3) Logistic Performance Index.
- b. Peningkatan daya saing konstruksi nasional, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi.
- c. Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat Ease of Doing Business.
- d. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.
- e. Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Rasio Gini.
- f. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat



2.4.2. HASIL ANALISIS RENSTRA DINAS PERUMAH RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RENSTRA RTRW KABUPATEN BANJAR

RTRW Kabupaten Banjar merupakan pedoman bagi kegiatan pembangunan fisik dan spesial wilayah Kabupaten Banjar. Dokumen RTRW merupakan rencana struktur ruang dan rencana pada ruang. Rencana struktur ruang sendiri memuat rencana sistem kata – kata dan rencana prasarana dasar wilayah sedangkan rencana pada ruang memuat rencana peruntukan ruang.

Terkait dengan permasalahan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup dalam dokumen RTRW juga dilengkapi dengan ketentuan peraturan zonasi yang bertujuan mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ketentuan peraturan zonasi sepatutnya dipatuhi oleh semua pelaku pembangunan dan juga pemerintahan sebagai pengawas pembangunan termasuk Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Hubungan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Tata Ruang sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Harus Berpedoman pada Rencana Tata Ruang, melalui sinkronisasi program pemanfaatan ruang ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah.
- 2) Rencana Tata Ruang Daerah harus dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah (sebagai panglima pembangunan di daerah)
- 3) Rencana Tata Ruang Daerah sebagai perwujudan rencana struktur dan pola ruang dipastikan terlaksana, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang.
- 4) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya mengintegrasikan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan. Konsistensi



pemanfaatan ruang dapat tercapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

2.4.3. ANALISIS REALISASI PELAYANAN DINAS PERUMAH RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TERHADAP TARGET KLHS KABUPATEN BANJAR

Inti daripada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah mengkaji sejauh mana daya dukung dan daya tampung wilayah mampu mendukung pengembangan wilayah tersebut seperti ketersediaan air, resiko kebencanaan dan lainnya. Hal ini sangat perlu agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berkelanjutan.

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dimulai dengan mengidentifikasi dan merumuskan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan dalam berdasarkan capaian TPB/ SDG's dan menetapkan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas. Dan berakhir dengan merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan kondisi umum wilayah



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, diperlukan identifikasi permasalahan yang ada atau akan dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Secara umum faktor-faktor internal yang mempengaruhi permasalahan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup antara lain adalah Izin lingkungan, terbatasnya kuantitas dan SDM yang berkompetensi khusus di bidang lingkungan, sosialisasi pencegahan pencemaran air dan udara, informasi dan edukasi masyarakat, kurangnya alokasi dana untuk program pembuatan taman dan biomassa, kawasan lingkungan perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah, jumlah SDM pengawasan tidak sebanding dengan luasan wilayah, mutasi pegawai yang sudah terlatih dan kurangnya pejabat penyidik pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Banjar.

Sedangkan faktor eksternal antara lain terbatasnya lembaga pelatihan yang khusus menangani lingkungan hidup, faktor musim yang menyebabkan tanaman kering dan memicu kebakaran, sulitnya lahan di wilayah perkotaan untuk penyediaan RTH, belum ada regulasi yang mengikat dalam penanganan Kawasan permukiman kumuh sehingga penanganan hanya bersifat on the spot, berkurangnya lahan untuk bervegetasi, kurangnya kesadaran masyarakat atau pelaku usaha dan kecenderungan budaya masyarakat pelaku pencemaran.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. BANJAR

Permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam fungsi pelayanan beserta faktor yang mempengaruhinya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Masih Tingginya Polusi Air dan Udara	Kurang Optimalnya Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
			Masih Seringnya Terjadi Kejadian Banjir Dan Kebakaran Hutan
			Kesadaran Masyarakat Terhadap Resiko Bencana Masih Rendah
			Masih Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau, Keanekaragaman Hayati Dan Kampung Iklim
2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Lingkungan Terhadap Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, Izin PPLH	Ketaatan Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kurangnya Intensitas Pengawasan/Monitoring Terhadap Jumlah Dokumen Izin Lingkungan
			Masih Terbatasnya Pejabat Pengawas Yang Terdidik Dan Terampil
		Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersedia	Masih Kurangnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup
			Masih Kurangnya Dokumen Klhs Rpjm Dan Klhs Rtr
3	Persentase Timbulan Sampah Yang Tertangani	Masih Tingginya Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Yang Belum Tertangani	Sarana Prasarana Armada Persampahan Yang Belum Memadai Dan Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Perilaku Membuang Sampah Sembarangan



			Masih Kurangnya Pelaku Usaha Yang Memiliki Izin Tps Limbah B3 Dari Jumlah Pengajuan Izin Yang Teregistrasi
4	Menjadikan Permukiman Yang Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan	Kebutuhan Perumahan Dimasa Yang Akan Datang	Kebutuhan Rumah Yang Diakibatkan Oleh Pertumbuhan Penduduk
		Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Dan Permukiman Kumuh	Masih Adanya Rumah Tidak Layak Huni Dan Permukiman Kumuh
		Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Di Perumahan Dan Permukiman	Belum Meratanya Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Di Perumahan Dan Permukiman

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026 secara substansi tidak terlepas dari motto daerah, untuk mencerminkan tekad dan semangat yang tinggi dari masyarakat Kab. Banjar dalam ikut serta dan berperan aktif melanjutkan dan meningkatkan pembangunan Daerah Banjar dengan tetap dilandasi iman dan taqwa, semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.

Implementasi dari filosofi pembangunan Kabupaten Banjar juga di terjemahkan dalam Visi Kabupaten Banjar yaitu "Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis", dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Maju dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan sebagai menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); berkembang.
2. Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development



3. Mandiri dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. Artinya kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan.
4. Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah.
5. Agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama.
6. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup, kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 5 misi Kabupaten Banjar yang merupakan kelanjutan dari misi sebelumnya yaitu :

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Keterkaitan Misi Kepala Daerah dengan Tupoksi SKPD tercantum dalam misi ke tiga yaitu : "Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan".



3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DENGAN RENSTRA DPRKPLH KAB. BANJAR

3.3.1. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RENSTRA DPRKPLH KAB. BANJAR

Faktor-faktor penghambat ataupun fakto-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup apabila ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Renstra DPRKPLH Kab. Banjar

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan ketahanan air dan kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya upaya dalam peningkatan Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang melibatkan instansi terkait - Terbatasnya Sarana dan Prasarana dalam menunjang pemantauan kualitas lingkungan - Koordinasi antar SKPD tidak optimal - Terbatasnya dana - Rendahnya kompetensi SDM Aparatur - Kurang validnya data dan informasi pemantauan lingkungan yang tersedia - Lemahnya sanksi hukum yang diberikan terhadap pelanggar/ perusak lingkungan hidup - Tidak adanya PPNS khusus yang menangani lingkungan hidup - Kurangnya Aparatur Pengawas LH - Belum optimalnya pengawasan dalam pengelolaan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat/pengusaha terutama yang tinggal di bantaran sungai - Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat - Belum optimalnya pelaksanaan reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang - Belum memadainya regulasi daerah berkaitan dengan pengelolaan lingkungan - Lemahnya pengetahuan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan - Meningkatnya pembukaan lahan untuk kawasan pemukiman dan kegiatan pertambangan - Meningkatnya volume kendaraan bermotor sehingga menyebabkan meningkatnya polusi gas emisi udara - Kebiasaan masyarakat membakar lahan untuk membuka lahan persawahan dan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan dari Kepala Daerah, DPRD dan Pemangku kepentingan (Stake Holders) - Tersedianya regulasi daerah berkaitan dengan pengelolaan lingkungan - Adanya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan - Tersedianya dana - Adanya pelatihan/diklat bagi aparatur, masyarakat dan pengusaha
2	Memanfaatkan potensi hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan hutan dan lingkungan hidup sebagai penunjang perekonomian masyarakat - Terbatasnya dana - Kurangnya perhatian pemerintah dalam mendukung pemanfaatan hutan dan lingkungan hidup untuk meningkatkan perekonomian masyarakat - Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan hutan dan LH 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup terhadap masyarakat - Belum optimalnya pembinaan terhadap kader lingkungan di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan dari Kepala Daerah, DPRD dan pemangku kepentingan (Stake Holders) - Tersedianya dana - Dilaksanakannya sosialisasi



3	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pelaksanaan program Keanekaragaman Hayati - Kurangnya koordinasi antar instansi terkait - Terbatasnya dana '- Terbatasnya Jenis keanekaragaman hayati - Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya ketersediaan lahan untuk pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati dan Ruang Terbuka Hijau - Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengembangan program Keanekaragaman Hayati 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan dari Kepala Daerah, DPRD dan pemangku kepentingan (Stake Holders) - Tersedianya dana - Terlaksananya koordinasi antar instansi '- Tersedianya regulasi di daerah
---	--	---	--	---



3.3.2. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PUPR DENGAN RENSTRA DPRKPLH KAB. BANJAR

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



Tujuan Kementerian PUPR adalah:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kajian Lingkupan Hidup Strategis (KLHS) adalah mempunyai kaitan erat dengan Rencana Kebijakan dan Program (RKP) pembangunan daerah. Strategis memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dengan demikian, dalam konteks KLHS, aktivitas tersebut adalah suatu kajian yang sejak awal mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan di arah kebijakan, rencana, atau program. Untuk proses pengambilan keputusan, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu isu-



isu strategis yang sedang terjadi di Kabupaten yang masuk dalam aspek-aspek lingkungan.

Adapun beberapa masalah lingkungan hidup di Kabupaten banjar adalah sebagaimana disebutkan dibawah ini:

- a. Masih tingginya polusi air dan udara;
- b. Sarana prasarana armada persampahan yang belum memadai dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku membuang sampah sembarangan;
- c. Masih terbatasnya ruang terbuka hijau (RTH);
- d. Masih seringnya terjadi kejadian banjir dan kebakaran hutan yang mempengaruhi kualitas Lingkungan Hidup;
- e. Kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana masih rendah; perlu dibentuknya desa-desa tangguh bencana;



3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Analisis strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis yang dapat di operasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, peluang yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar adalah :

- a. Kondisi geografis Kabupaten Banjar yang sangat luas dan memiliki kekayaan SDA melimpah menjadikan sumber penghidupan bagi masyarakat.
- b. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi pada peningkatan proses daur ulang sampah dan air limbah
- c. Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Sedangkan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah (i) Kurangnya respon para pemangku kepentingan terhadap isu-isu lingkungan global (perubahan iklim, pemanasan global, penipisan lapisan ozon); (ii) Dukungan Undang-undang untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan air limbah dengan menggunakan konsep dan sanitary landfill; (iii) Laju pencemaran / kerusakan lingkungan yang semakin meningkat setiap tahunnya terutama di



wilayah perkotaan Kabupaten Banjar akibat dinamika kegiatan rumah tangga, ekonomi, transportasi dan pembangunan; (iv) perlunya meningkatkan konservasi sumberdaya air dan keanekaragaman hayati serta pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana agar ketersediaan sumber air baik secara kualitas dan kuantitas dapat terjaga dan terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dari tantangan tersebut menjadi landasan bagi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar untuk mempertimbangkan isu-isu strategis untuk pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi :

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
2. Kurangnya pengetahuan dalam memanfaatkan Sampah
3. Kurangnya Luasan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Keanekaragaman Kehati
4. Pencemaran air sungai dan tanah oleh limbah cair dan padat
5. Pencemaran udara dari kegiatan industri, pertambangan dan emisi gas buang kendaraan bermotor.
6. Perumahan yang layak huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta tersedianya lingkungan sehat yang aman dan didukung oleh Prasarana, Sarana dan Utilitas yang memadai.
7. Minimnya Instrumen dalam perencanaan dan pengendalian tata ruang;
8. Sumberdaya manusia yang terbatas, sehingga pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum/optimal;
9. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja;
10. Belum tersedianya database prasarana, sarana, dan utilitas serta prasarana dan sarana dasar kegiatan di semua bidang sehingga pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan serta tidak tersusun secara sistematis dan akurat
11. Rendahnya ketaatan perusahaan dan atau pelaku usaha terhadap hukum lingkungan



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

4.1.1. TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Perumusan pernyataan tujuan jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar adalah “Terwujudnya Pembangunan Yang Berkelanjutan”. Tujuan ini dimaksudkan terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dengan prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik, dengan kualitas cakupan pelayanan dengan menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan hidup dengan mengikuti perkembangan regulasi sebagaimana pengaturan aspek lingkungan dalam UU Cipta Kerja. Adapun tujuan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat di lihat pada tabel T-C.25.

4.1.2. SASARAN

Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan atau penyempurnaan berkelanjutan yang harus dilaksanakan dengan berhasil. Sasaran yang baik melalui rumusan berorientasi pada kegiatan (action oriented) yang mudah dipahami untuk dilaksanakan. Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dalam kurun waktu lima tahun jangka menengah dapat di lihat pada tabel T-C.25.

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumah Rakyat Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Banjar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Pembangunan Yang Berkelanjutan		INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	61,93	62,25	62,58	62,88	63,18
			PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI	97,16%	97,23%	97,30%	97,38%	97,45%
		Meningkatnya perumahan yang layak huni	1. Persentase rumah Layak Huni	97,16%	97,23%	97,30%	97,38%	97,45%
			2. Persentase PSU yang memadai	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Kawasan Permukiman yang layak	Persentase kawasan kumuh layak	91,99%	91,92%	90,59%	89,89%	89,20%
		Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,2	50,3	50,4	50,5	50,6
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	76,83	76,93	77,03	77,13	77,23
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	54,51	55,64	56,78	57,78	58,78
		Meningkatkan Perlindungan Pengelolaan, Pembinaan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Lingkungan Terhadap Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, Izin RPPLH	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Meningkatnya Penanganan / Pengelolaan Sampah	Persentase Timbulan Sampah Yang Tertangani	73,00%	72,00%	71,00%	70,00%	70,00%
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Persentase Terselenggaranya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		



BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

5.1.1. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, dilakukanlah analisis strategis untuk mengidentifikasi secara sistematis upaya konkrit yang perlu dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Analisis strategis dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal (yang memuat faktor peluang dan tantangan).

5.1.2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan SKPD, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor – faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan fungsi dan peran, sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, yaitu :

1. Izin lingkungan yang diberikan karena telah tersusunnya dokumen lingkungannya
2. Informasi dan edukasi masyarakat
3. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan
4. Masih terbatasnya kuantitas SDM yang berkompetensi khusus lingkungan, kesempatan pelatihan bagi Pegawai DPRKPLH.



5. Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah sehingga pembangunan lebih banyak diarahkan ke perkotaan hal ini menimbulkan kesenjangan wilayah antara kota besar, kota menengah atau antara kota desa

b. Faktor Eksternal

Faktor – faktor eksternal lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup , yaitu :

1. Ijin pelaksanaan kegiatan yang dimaksud
2. Eksekutor pelanggaran dokumen lingkungan
3. Terbatasnya lembaga pelatihan yang khusus menangani lingkungan
4. Meningkatnya kebutuhan rumah layak huni dan kualitas perumahan dan permukiman yang baik
5. Urbanisasi yang dapat berakibat tumbuhnya permukiman kumuh

Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran - sasaran strategis Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Perlindungan Pengelolaan, Pembinaan dan Petaatan Lingkungan Hidup
3. Meningkatnya Penanganan/Pengelolaan Sampah
4. Meningkatnya Perumahan Yang Layak Huni
5. Kawasan Permukiman Yang Layak



5.2. KEBIJAKAN

5.2.1. SISTEM KEBIJAKAN

Menurut Mustopadidjaja, A.R (2001), kebijakan adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan. Dalam merumuskan atau menetapkan suatu kebijakan-kebijakan dikenal adanya sistem kebijakan, yang terdiri dari:

- 1) Lingkungan kebijakan, adalah keadaan yang melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya masalah kebijaksanaan, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh suatu kebijakan.
- 2) Pembuat dan Pelaksana Kebijakan, adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai "peranan tertentu" dalam sistem dan proses kebijaksanaan, sebab mereka berada dalam posisi menentukan ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijaksanaan ataupun dalam tahap pelaksanaannya, dalam arti pengawasan, pengendalian dan pelatihan atas hasil-hasil yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan.
- 3) Kebijakan itu sendiri, yaitu keputusan atau serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.
- 4) Kelompok Sasaran Kebijakan, yaitu orang atau sekelompok orang, atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku atau keadaannya ingin dipenuhi oleh kebijakan bersangkutan.

Memperhatikan ke empat sistem kebijakan diatas, maka untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan, Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar merumuskan



kebijakan yang akan dijadikan landasan dalam menentukan program dan kegiatan yaitu :

1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Tutupan Lahan
3. Terkendalinya Pembangunan Yang Berkelanjutan (Sustainable)
4. Meningkatnya Jumlah Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan
5. Masyarakat Hukum Adat Yang Melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Pengaduan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Tertangani
7. Meningkatnya Ketaatan Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Berkurangnya Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Yang Dikelola
9. Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 Dari Pelaku Usaha
10. Meningkatnya Penanganan Terhadap Rumah Korban Bencana Atau Relokasi
11. Perumahan Yang Dibangun Sesuai Dengan Dokumen Teknis Atau Siteplan Yang Sudah Disahkan
12. Meningkatnya Kualitas Rtlh
13. Tersedianya Prasarana & Sarana Utilitas Umum (Psu)
14. Meningkatnya Penanganan Terhadap Kawasan Kumuh Yang Telah Ditetapkan Melalui Sk Bupati Nomor 188.45/221/Kum/2020

5.2.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN

Visi

Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis

Misi

MISI 3 : Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



Tabel T-C. 26. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Misi III : PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Pembangunan Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Perumahan Yang Layak Huni	Pembinaan Dan Pengendalian Penyediaan Hunian Perumahan Yang Berimbangan, Beserta Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pendukungnya	Peningkatan Ketertiban Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan
			Peningkatan Kualitas Dan Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni (Rumah Swadaya, Rumah Formal)
			Peningkatan Fasilitasi Penerbitan Perizinan Perumahan (Rumah Umum, Rumah Khusus, Rumah Susun)
			Peningkatan Koordinasi Penerbitan Dan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan
	Kawasan Permukiman yang layak	Penataan Kawasan Kumuh	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Menggencarkan Program & Kegiatan Yang Berfokus Pada Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Dengan Melakukan Pemantauan Kualitas Air Dan Udara Secara Berkala serta Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Yang Memiliki Potensi Menjadi Sumber Pencemar	Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Tutupan Lahan
			Terkendalinya Pembangunan Yang Berkelanjutan (Sustainable)
	Meningkatkan Perlindungan Pengelolaan, Pembinaan Dan Pnaatan Lingkungan Hidup	Meningkatkan Wawasan Masyarakat Maupun Pelaku Usaha Terkait Perlindungan, Pengelolaan, Pembinaan dan Pnaatan Lingkungan Hidup Dengan Memberikan Arahan Secara Langsung Maupun Berdasarkan Hasil Pengaduan	Meningkatkan Jumlah Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan
			Masyarakat Hukum Adat Yang Melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pengaduan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Tertangani			
Meningkatkan Ketaatan Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup			
Meningkatnya Penanganan/Pengelolaan Sampah	Meningkatkan Penanganan/Pengelolaan Sampah Serta Melakukan Pembinaan Kepada Masyarakat Terkait Pengelolaan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Berkurangnya Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Yang Dikelola	
		Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 Dari Pelaku Usaha	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian dengan mengutamakan kecermatan, tepat waktu dan tepat mutu	Meningkatkan Ketepatan Waktu dan Mutu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Meningkatkan Ketepatan Waktu dan Mutu Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan pelatihan dan bimbingan teknis
			Meningkatkan Kualitas Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah Selama Tahun Berjalan
			Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Meningkatkan Kualitas Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor
			Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Sesuai Dengan RKPMD



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. PENGANTAR

Untuk mencapai rencana program kegiatan diperlukan indikator kegiatan pada kelompok sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan pendanaan yang diperlukan untuk membiayai Program Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Banjar sebagaimana akan diuraikan pada bab ini.

6.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan organisasi baik pada perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai. Selain itu indikator kinerja juga digunakan untuk menyakinkan bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan. Hal tersebut selaras dengan visi dan misi yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Banjar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Banjar diimplementasikan melalui strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam lima tahun ke depan harus dapat diwujudkan sasaran yang telah dituangkan di dalam Renstra Tahun 2022-2026. Program merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan.



Mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah, serta memperhatikan kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Banjar, maka program dan kegiatan Dinas adalah sebagai berikut:



Tabel 6.1 (T-C.27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran RPJMD	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan Lingkungan Hidup	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcom) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Parangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN				IKLH	61,89	61,93		62,25		62,58		62,88		63,18		63,18	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR			
				PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI	97,15%	97,16%	43.888.886.400	97,23%	37.622.701.844	97,30%	38.098.866.912	97,38%	38.582.821.589	97,45%	40.126.134.453	97,45%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR			
3.1.4	MENURUNKAN PELANGGARAN HUKUM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP	20,00%	8.704.300.000	15,00%	6.634.017.560	10,00%	6.587.378.262	5,00%	6.850.873.392	0,00%	7.124.908.329	0,00%	7.124.908.329	0,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR		
				Indeks Kualitas Air (IKA)	50,1	50,20		50,30		50,40		50,50		50,60		50,60		50,60	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR	
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	76,73	76,83	8.110.105.000	76,93	6.016.054.240	77,03	5.944.696.409	77,13	6.182.484.266	77,23	6.429.783.637	77,23	77,23	77,23	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR	
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	52,80	54,51		55,64		56,78		57,78		58,78		58,78		58,78		DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Pencemaran Air	5,5	5,4	1.410.855.100	5,3	1.467.289.304	5,2	1.525.980.876	5,1	1.587.020.111	5,1	1.650.500.916	5,1	1.650.500.916	5,1	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Air	50,1	50,2		50,3		50,4		50,5		50,6		50,6		50,6	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
					Indeks Kualitas Udara	76,73	76,83	1.209.765.900	76,83	1.258.156.536	77,03	1.308.482.797	77,13	1.360.822.109	77,23	1.415.254.994	77,23	77,23	77,23	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	30,00%	25	1.050.798.000	30	502.829.920	35	546.543.117	40	592.004.841	45	639.285.035	175	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Milligasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	100,00%	1	65.000.000	1	67.600.000	1	70.304.000	1	73.116.160	1	76.040.806	5	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Penujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	100,00%	25	93.967.900	30	687.726.616	35	691.635.681	40	695.701.108	45	699.929.152	175	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	Persentase Desa Yang Ditanggulangi Dampak Kerusakan Lingkungannya	100,00%	100,00%	150.423.200	100,00%	156.440.128	100,00%	162.697.733	100,00%	169.205.642	100,00%	175.973.868	100,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	100,00%	2	150.423.200	2	156.440.128	2	162.697.733	3	169.205.642	3	175.973.868	12	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	Persentase Desa Yang Dilakukan Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0,00%	100,00%	50.666.000	100,00%	52.692.640	100,00%	54.800.346	100,00%	56.992.359	100,00%	59.272.054	100,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	0,00%	1	50.666.000	1	52.692.640	1	54.800.346	1	56.992.359	1	59.272.054	1	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Lokasi Kawasan Keaneekaragaman Hayati Yang Ditangani	100,00%	100,00%	6.584.707.100	100,00%	4.129.640.424	100,00%	4.294.826.041	100,00%	4.466.619.083	100,00%	4.645.283.846	100,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	Persentase Luas Kawasan Keaneekaragaman Hayati Yang Ditangani	100,00%	100,00%	6.584.707.100	100,00%	4.129.640.424	100,00%	4.294.826.041	100,00%	4.466.619.083	100,00%	4.645.283.846	100,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00%	3,7	50.000.000	3,7	50.000.000	3,7	52.000.000	3,7	54.000.000	3,7	56.000.000	3,7	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	58,00%	6,64	6.385.082.500	11,35	3.928.640.424	15,79	4.084.826.041	20,63	4.247.619.083	24,82	4.417.283.846	24,82	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00%	2,5	124.997.800	3	125.000.000	3,5	130.000.000	4	135.000.000	4,5	140.000.000	4,5	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	100,00%	10	24.626.800	20	26.000.000	30	28.000.000	40	30.000.000	50	32.000.000	50	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersedia	100,00%	100,00%	114.542.800	100,00%	419.124.512	100,00%	123.889.492	100,00%	128.845.072	100,00%	133.998.875	100,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100,00%	100,00%	114.542.800	100,00%	119.124.512	100,00%	123.889.492	100,00%	128.845.072	100,00%	133.998.875	100,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	100,00%	1	114.542.800	1	119.124.512	1	123.889.492	1	128.845.072	1	133.998.875	5	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



			PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATENKOTA	Persentase Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Yang Tersusun	-	-	-	-	300.000.000	100,00%	-	-	-	-	100,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR					
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	100,00%	0	-	1	150.000.000	0	-	0	-	0	-	1	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR				
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	100,00%	0	-	1	150.000.000	0	-	0	-	0	-	1	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR				
		Meningkatkan Perlindungan, Pengabdian, Pembinaan dan Pensaian Lingkungan Hidup		Persentase Kesesuaian Pemertanisan Lingkungan Terhadap Dokumen Lingkungan, Izin RPLPH	-	100%	-	594.195.000	100%	617.963.320	100%	642.681.853	100%	668.389.126	100%	695.124.692	50,60	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR			
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah Yang Berwawasan Lingkungan	20,00%	25,00%	213.435.000	30,00%	221.972.920	35,00%	230.851.837	40,00%	240.085.910	45,00%	249.689.347	45,00%	249.689.347	45,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR		
			PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sekolah Yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	97,00%	50,00%	213.435.000	55,00%	221.972.920	65,00%	230.851.837	75,00%	240.085.910	90,00%	249.689.347	90,00%	249.689.347	90,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR		
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	97,00%	1	213.435.000	1	221.972.920	1	230.851.837	1	240.085.910	1	249.689.347	5	249.689.347	5	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR		
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengeloa Lingkungan Hidup	-	25,00%	50.000.000	50,00%	52.000.000	75,00%	54.080.000	100,00%	56.243.200	100,00%	58.492.928	100,00%	58.492.928	100,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR		
			PENGAKUAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Masyarakat Hukum Adat Yang Mengeloa Lingkungan Hidup	-	25,00%	50.000.000	50,00%	52.000.000	75,00%	54.080.000	100,00%	56.243.200	100,00%	58.492.928	100,00%	58.492.928	100,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR		
			Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	-	1	50.000.000	1	52.000.000	1	54.080.000	1	56.243.200	1	58.492.928	5	58.492.928	5	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR		
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pelayanan Pengaduan Pencemaran dan Konsakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang Tersesalkan	100,00%	100,00%	96.094.000	100,00%	99.937.760	100,00%	103.935.270	100,00%	108.092.681	100,00%	108.092.681	100,00%	112.416.388	100,00%	112.416.388	100,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATENKOTA	Persentase Pengaduan Pencemaran dan Konsakan Lingkungan dan Kasus Sengketa Lingkungan Yang Ditindak Lanjuti	100,00%	100,00%	96.094.000	100,00%	99.937.760	100,00%	103.935.270	100,00%	108.092.681	100,00%	108.092.681	100,00%	112.416.388	100,00%	112.416.388	100,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dindaklanjuti/Ditangani	90,00%	10	65.430.000	10	67.351.880	10	69.350.635	10	71.429.341	10	73.591.194	50	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	100,00%	5	30.664.000	5	32.585.880	5	34.584.635	5	36.663.341	5	38.825.194	25	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Kotauban Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	60,00%	100,00%	234.666.000	100,00%	244.052.640	100,00%	253.814.746	100,00%	263.967.335	100,00%	274.526.029	100,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Hasil Temuan Yang Dindak Lanjut	20,00%	100,00%	234.666.000	100,00%	244.052.640	100,00%	253.814.746	100,00%	263.967.335	100,00%	274.526.029	100,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Facilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	97,00%	15	84.398.700	15	86.092.020	15	92.214.240	15	95.470.903	15	104.030.598	75	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100,00%	0	-	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	4	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	30	80.272.000	30	82.618.600	30	82.712.527	30	88.106.462	30	88.498.769	150	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	100,00%	30	69.995.300	30	72.342.020	30	75.887.979	30	77.389.970	30	78.996.662	150	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
	3.1.2	TERCIPTANYA PEMUKIMAN YANG NYAMAN DAN LAYAK HUNI		PERSENTASE KAWASAN KUMUH		9,67%	35.184.586.400	9,12%	30.988.684.284	8,59%	31.511.488.650	8,05%	31.731.948.197	7,51%	33.001.226.124	7,51%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
		Meningkatnya Penanganan / Pengelolaan Sampah		Persentase Timbulan Sampah Yang Tertangani		73,00%	17.337.222.700	72,00%	16.899.426.036	71,00%	16.858.660.072	70,00%	16.493.006.476	70,00%	17.152.726.735	70,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		24,00%	17.107.264.300	27,00%	16.660.269.300	28,00%	16.609.937.067	29,00%	16.234.334.550	30,00%	16.883.707.932	30,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
		PENGELOLAAN SAMPAH		Persentase Pengurangan Sampah		24,00%	17.107.264.300	24,20%	16.660.269.300	24,30%	16.609.937.067	24,40%	16.234.334.550	24,50%	16.883.707.932	24,50%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Persentase Sampah Yang Ditangani		60,00%	17.107.264.300	61,25%	16.660.269.300	61,50%	16.609.937.067	61,75%	16.234.334.550	62,00%	16.883.707.932	62,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



			Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	75,31%	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR		
			Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	100,00%	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	UPT PERSAMPAHAN	KABUPATEN BANJAR		
			Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	60,00%	65700	10.906.038.800	65700	11.106.038.800	65700	11.106.038.800	65700	11.106.038.800	65700	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR		
			Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	50,00%	4	185.479.500	4	185.479.500	4	185.479.500	4	185.479.500	20	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR		
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	100,00%	12	2.865.751.000	15	2.018.751.000	15	1.968.418.767	12	1.592.816.250	10	1.999.995.000	64	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	60,00%	65700	2.899.995.000	65700	3.100.000.000	65700	3.100.000.000	65700	3.100.000.000	65700	3.100.000.000	65700	UPT PERSAMPAHAN	KABUPATEN BANJAR
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0,00%	0	-	0	-	0	-	0	-	1	242.194.632	1	UPT PERSAMPAHAN	KABUPATEN BANJAR
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3 dari jumlah pengajuan izin yang terregistrasi	100,00%	100,00%	229.958.400	100,00%	239.156.736	100,00%	248.723.005	100,00%	258.671.926	100,00%	269.018.803	100,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Izin TPS Limbah B3	35,00%	50,00%	229.958.400	58,00%	239.156.736	60,00%	248.723.005	62,00%	258.671.926	65,00%	269.018.803	65,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	35,00%	1	30.183.400	1	32.381.736	1	34.948.005	1	37.896.926	1	41.243.803	5	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	35,00%	1	199.775.000	1	206.775.000	1	213.775.000	1	220.775.000	1	227.775.000	5	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Meningkatkan Perumahan Yang Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	97,15%	97,16%	15.290.359.600	97,23%	12.989.973.984	97,30%	13.509.572.943	97,38%	14.049.955.861	97,45%	14.611.954.095	97,45%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
		Persentase PSU Yang Memadai		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	100,00%	100,00%
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penanganan Rumah Yang Terkena Bencana Maupun Terkena Rawakasi Program Kabupaten	100%	100%	733.417.000	100%	762.753.680	100%	793.263.827	100%	824.994.380	100%	857.994.155	100%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah yang terdapat akibat korban bencana	11 unit	100%	60.867.200	100%	65.000.000	100%	68.263.827	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	1	60.867.200	1	50.000.000	1	53.263.827	1	50.000.000	1	50.000.000	5	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	0	0	.	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	0	0	.	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	323	0	.	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase orang yang memahami materi yang disampaikan setelah mengikuti sosialisasi	100%	100%	97.323.600	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	117.994.155	100%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	100	97.323.600	150	100.000.000	150	110.000.000	150	110.000.000	150	117.994.155	700	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	4 Unit	100%	389.596.700	100%	390.000.000	100%	390.000.000	100%	424.994.380	100%	450.000.000	100%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terrehabilitasi	0	10	389.596.700	5	195.000.000	5	195.000.000	5	212.497.190	5	225.000.000	30	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	0	0	.	5	195.000.000	5	195.000.000	5	212.497.190	5	225.000.000	20	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang Diberikan	N/A	100%	185.629.500	100%	207.753.680	100%	225.000.000	100%	225.000.000	100%	225.000.000	100%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Facilitasi Penuhannya Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	0%	50	79.323.900	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	250	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0%	1	106.305.600	1	107.753.680	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	5	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	22,57%	22,62%	485.501.200	22,68%	504.921.248	22,78%	525.118.098	22,83%	546.122.822	22,89%	567.967.735	22,89%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RTLH yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	N/A	100%	485.501.200	100%	504.921.248	100%	525.118.098	100%	546.122.822	100%	567.967.735	100%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	N/A	14	485.501.200	14	504.921.248	15	525.118.098	15	546.122.822	16	567.967.735	74	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	20,77%	20,96%	14.071.441.400	21,14%	11.722.299.056	21,33%	12.191.191.018	21,52%	12.678.838.659	21,71%	13.185.992.205	21,71%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Unsur Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang mendapatkan peningkatan kualitas PSU	100,00%	100,00%	14.071.441.400	100,00%	11.722.299.056	100,00%	12.191.191.018	100,00%	12.678.838.659	100,00%	13.185.992.205	100,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	N/A	18	3.799.999.000	4	1.100.000.000	4	1.100.000.000	4	1.100.000.000	4	1.100.000.000	34	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	N/A	1	27.131.600	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	N/A	0	.	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	120	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	N/A	15	10.244.310.800	20	10.392.299.056	25	10.861.191.018	30	11.348.838.659	35	11.855.992.205	125	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Kawasan Permukiman Yang Layak	Persentase kawasan kumuh	N/A	91,99%	2.557.004.100	91,92%	1.099.284.264	90,59%	1.143.255.635	89,89%	1.188.985.860	89,20%	1.236.545.294	89,20%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	0,00%	10,13%	2.557.004.100	15,23%	1.099.284.264	20,23%	1.143.255.635	25,23%	1.188.985.860	30,23%	1.236.545.294	30,23%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah desa/kelurahan yang teridentifikasi sesuai pola penanganan	N/A	3	300.000.000	5	439.713.706	5	457.302.254	5	475.594.344	5	494.618.118	23	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	N/A	1	185.243.000	2	240.000.000	2	250.000.000	2	260.000.000	2	270.000.000	9	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	N/A	1	70.400.000	1	155.000.000	1	160.000.000	1	165.000.000	1	170.000.000	5	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	N/A	5	44.357.000	5	44.713.706	5	47.302.254	5	50.594.344	5	54.618.118	25	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	N/A	27,56	2.257.004.100	2,4	659.570.558	2,4	685.953.381	2,4	713.391.516	2,4	741.927.176	37,2	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



			Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		2	247.982.400	3	251.285.132	3	261.838.261	3	272.813.515	3	284.227.779	14	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		5	6.621.700	5	7.000.000	5	7.000.000	5	7.000.000	5	7.000.000	25	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR	
			Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh		10	87.300.000	15	60.000.000	15	60.000.000	15	60.000.000	15	60.000.000	70	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR	
			Plaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar		2	1.915.100.000	2	341.285.426	2	357.115.120	2	373.578.001	2	390.699.397	10	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian		Persentase Terselenggaranya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah		100,00%	100,00%	13.800.415.130	100,00%	16.352.431.735	100,00%	14.926.529.005	100,00%	15.523.590.164	100,00%	16.144.533.772	100,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terevisuainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00%	100,00%	13.800.415.130	100,00%	16.352.431.735	100,00%	14.926.529.005	100,00%	15.523.590.164	100,00%	16.144.533.772	100,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu		100,00%	100,00%	31.053.732	100,00%	51.053.732	100,00%	51.053.732	100,00%	51.053.732	100,00%	51.053.732	100,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100,00%	2	3.000.000	2	3.000.000	3	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	11	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00%	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	5	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100,00%	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	5	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		100,00%	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	5	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		100,00%	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	5	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100,00%	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	15	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00%	16	14.053.732	16	34.053.732	16	34.053.732	16	34.053.732	16	34.053.732	80	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



				ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Tersusunya Dokumen Pelaporan dan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	100,00%	100,00%	12.235.659.748	100,00%	12.278.994.361	100,00%	12.288.994.361	100,00%	12.841.874.677	100,00%	12.934.714.337	100,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%	13	10.255.183.548	13	10.255.183.548	13	10.255.183.548	13	10.255.183.548	13	10.255.183.548	13	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00%	13	1.954.240.000	13	1.990.496.254	13	2.000.496.254	13	2.553.376.570	13	2.646.216.230	13	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00%	1	13.753.400	1	19.006.614	1	19.006.614	1	19.006.614	1	19.006.614	1	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100,00%	16	7.076.600	16	8.901.745	16	8.901.745	16	8.901.745	16	8.901.745	16	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100,00%	13	5.406.200	13	5.406.200	13	5.406.200	13	5.406.200	13	5.406.200	13	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pegawai yang mengikuti BIMTEK	100,00%		10.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		2	10.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	18	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	629.810.600	100,00%	655.654.835	100,00%	655.574.683	100,00%	872.269.770	100,00%	1.100.093.561	100,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100,00%	6	21.027.700	6	26.027.700	6	26.027.700	6	26.027.700	6	26.027.700	30	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00%	4	77.418.400	4	77.418.400	4	77.418.400	4	77.418.400	4	207.091.994	20	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100,00%	0	.	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.500.000	4	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00%	0	.	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	4	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100,00%	4	12.480.500	4	13.734.735	4	13.654.583	4	13.754.586	4	13.848.445	20	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100,00%	3	18.000.000	3	18.000.000	3	18.000.000	3	18.000.000	3	18.000.000	15	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100,00%	5	7.410.000	0	.	0	.	0	.	0	.	5	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100,00%	0	.	10	7.000.000	10	7.000.000	10	7.000.000	10	7.000.000	40	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00%	419	493.474.000	419	486.474.000	419	486.474.000	450	703.069.084	450	795.625.422	450	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	0,00%	-	100,00%	2.450.127.895	100,00%	1.012.091.426	0,00%	-	0,00%	700.000.000	100,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0,00%	0	-	1	450.127.895	0	-	0	-	0	-	1	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0,00%	0	-	0	-	2	1.012.091.426	0	-	1	700.000.000	3	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0,00%	0	-	1	2.000.000.000	0	-	0	-	0	-	1	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi	100,00%	100,00%	436.424.140	100,00%	450.313.677	100,00%	450.874.445	100,00%	450.958.737	100,00%	451.335.758	100,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00%	12	3.370.000	12	3.814.245	12	3.845.121	12	3.845.216	12	3.895.452	60	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00%	3	306.603.140	3	315.245.166	3	315.484.659	3	315.655.632	3	315.484.644	12	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00%	3	126.451.000	3	131.254.266	3	131.544.665	3	131.457.889	3	131.955.662	15	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100,00%	100,00%	457.466.910	100,00%	446.287.235	100,00%	447.940.358	100,00%	1.287.433.248	100,00%	887.336.384	100,00%	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100,00%	1	81.980.000	1	85.122.145	1	85.784.922	1	85.445.621	1	85.457.996	1	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00%	9	252.641.910	9	261.235.144	9	262.452.155	9	262.585.663	9	262.154.561	9	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100,00%	70	35.820.000	70	38.714.523	70	38.154.528	70	38.541.245	70	88.154.262	70	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	100,00%	1	87.025.000	1	61.215.423	1	61.548.753	1	900.860.719	1	451.569.565	1	DPRKPLH	KABUPATEN BANJAR



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Misi Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tahun 2022 – 2026 merupakan penjabaran dari misi RPJMD Kab Banjar dan berintegrasi pada tujuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan strategi kebijakan yang selanjutnya ditetapkan sejumlah Program prioritas yang dilaksanakan sesuai fungsi Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Banjar sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran misi yang telah ditetapkan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja serta ditetapkan pada indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan misi – misi RPJMD sesuai tabel di bawah ini.

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2021-2026



Tabel 7.1 (T-C.28) Indikator Kinerja Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Perumahan Yang Layak Huni	n/a	97,16%	97,23%	97,30%	97,38%	97,45%	97,45%
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Kawasan Permukiman Yang Layak	n/a	91,99%	91,92%	90,59%	89,89%	89,20%	89,20%
3	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	n/a	IKA 50,20	IKA 50,30	IKA 50,40	IKA 50,50	IKA 50,60	IKA 50,60
			IKU 76,83	IKU 76,93	IKU 77,03	IKU 77,13	IKU 77,23	IKU 77,23
			IKTL 54,51	IKTL 55,64	IKTL 56,78	IKTL 57,78	IKTL 58,78	IKTL 58,78
4	Meningkatkan Perlindungan Pengelolaan, Pembinaan dan Pnaatan Lingkungan Hidup	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Penanganan / Pengelolaan Sampah	n/a	73%	72%	71%	70%	70%	70%
6	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB VIII P E N U T U P

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Banjar Tahun 2022-2026 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh aparatur Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra tersebut dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Dokumen Renstra Tahun 2022-2026 disusun sebagai dasar tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan SKPD yang dituangkan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banjar setiap tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan

Demikian Rencana Strategik ini dibuat, agar dapat dijadikan pedoman untuk penyusunan rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Pedoman Transisi

Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen rencana strategis Dinas Perumah Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada dokumen perencanaan jangka menengah di akhir jabatan Bupati/Wakil Bupati Banjar masa bakti 2022-2026, maka dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 disusun rancangan program indikatif sebagai berikut :



Tabel 8. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumah Rakyat
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar

Misi Pemerintah Kab. Banjar	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4
Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Terwujudnya Pembangunan Yang Berkelanjutan	Meningkatnya perumahan yang layak huni	1. Persentase Rumah Layak Huni 2. Persentase PSU Yang Memadai
		Kawasan Permukiman yang layak	Persentase Kawasan Kumuh layak
		Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Pelanggaran Lingkungan Hidup
		Meningkatkan Perlindungan Pengelolaan, Pembinaan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Lingkungan Terhadap Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, Izin RPPLH
		Meningkatnya Penanganan / Pengelolaan Sampah	Persentase Timbulan Sampah Yang Tertangani
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Persentase Terselenggaranya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah